

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu pulau besar dan kecil, yang terbentang dari sabang sampai merauke dan secara geografis terletak diantara dua samudera yaitu samudera hindia dan Samudera pasifik. Sebagai negara kepulauan, dimana wilayah laut lebih dominan dari wilayah daratan, maka dalam rangka pembangunan nasional ini masalah laut dengan segala aspeknya menjadi perhatian pemerintah. Pembangunan transportasi laut yang berperan sebagai salah satu urat nadi kehidupan ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi nasional yang handal, berkemampuan tinggi yang diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman, dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung pola distribusi nasional, serta mendukung pengembangan wilayah dan meningkatkan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

Pengangkutan laut sebagai bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan dalam rangka mewujudkan suatu Ketahanan Nasional, dengan mengutamakan pengaturan kapal yang dapat menggairahkan tumbuhnya perdagangan dan kegiatan dari pembangunan bidang ekonomi pada umumnya. Peran serta badan usaha milik negara dan swasta dalam sistem pengangkutan dalam maupun luar negeri harus terus didorong sehingga mampu memperoleh pangsa pasar yang wajar dalam pengangkutan penumpang dan barang dari dalam dan luar negeri. Dalam penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai keselamatan atas barang muatan sampai ditempat tujuan. Sebelum sampai ditempat tujuan, suatu barang muatan itu harus melalui tahap-tahap penyelenggaraan tertentu. Proses pengangkutan barang melalui laut merupakan suatu rangkaian kegiatan dari mulai barang diterima oleh

perusahaan pelayaran, disusun/ditimbun dalam gudang pelabuhan angkut, muat ke kapal, pelayaran dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan, pembongkaran barang dari kapal, penimbunan digudang, sampai barang diserahkan kepada pihak penerima. Salah satu kegiatan yang menonjol di pelabuhan adalah kegiatan bongkar muat barang baik barang dari kapal yang akan diangkut ke gudang-gudang maupun barang dari pelabuhan yang akan diangkut ke kapal-kapal menuju tempat tujuan. Kegiatan bongkar muat dipelabuhan oleh perusahaan-perusahaan bongkar muat yang ada disekitar pelabuhan.

Pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dipelabuhan sebenarnya merupakan pelaksanaan dari suatu perjanjian kerja antara perusahaan bongkar muat dengan pihak pengangkut sebagai pihak yang menguasai barang. Sehingga dalam pelaksanaan bongkar muat tidak terlepas dari adanya suatu perjanjian yang memberikan hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak.

Pelabuhan yang dikelola dengan efektif dan efisien serta dilengkapi dengan fasilitas yang memadai akan membawa dampak positif bagi perdagangan dan perindustrian dari daerah penyangga tempat pelabuhan tersebut berada sehingga setiap proses pelaksanaan bongkar muat barang di pelabuhan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, pelabuhan mempunyai peran penting dalam perdagangan internasional, Contohnya seperti PT.Pelabuhan Indonesia (PELINDO) sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang berperan sebagai regulator sekaligus operator, PT.Pelabuhan Indonesia (PELINDO) juga bertindak sebagai penyedia dan/atau melayani jasa bongkar muat petikemas/ barang. Pelaksanaan kegiatan usaha bongkar muat yang dilakukan oleh PT.Pelabuhan Indonesia (PELINDO) *regional* I TPK Perawang selama ini terhitung lancar. Namun sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang menjadi sedikit terhambat. Adanya persyaratan baru bagi setiap Perusahaan Bongkar Muat barang yang akan melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang yaitu saat ini diwajibkan memiliki izin khusus usaha bongkar muat barang. Sehingga terjadi tabrakan antara Peraturan Pemerintah Nomor 56, 57, 58, dan 59 Tahun 1991 tentang Pendirian

PT.Pelabuhan Indonesia dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal mengenai perizinan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha bongkar muat barang. (https://optgperak.dephub.go.id/Beranda/regulasidownload/pm_60_tahun_2014.pdf)

Berdasarkan pengamatan penulis, PT.Pelabuhan Indonesia (PELINDO) *regional* I TPK Perawang yang merupakan salah satu perusahaan bongkar muat petikemas di perawang, pada saat proses bongkar muat terkadang terjadi kendala yang membuat proses bongkar muat menjadi terhambat. Kendala tersebut biasanya terjadi karena kerusakan alat, ketersediaan suku cadang dan alat yang kurang memadai, kondisi cuaca yang tidak menentu, tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang telat datang, dan operator *crane* yang terkadang telat atau malas mengoperasikan alat, tallysheet yang habis, dan gangguan jaringan pada saat menginput data container ke dalam aplikasi.

Berdasarkan uraian diatas, untuk itu penulis memilih judul **“PROSES PELAKSANAAN BONGKAR MUAT PETIKEMAS DI PT. PELINDO REGIONAL 1 TERMINAL PETIKEMAS (TPK) PERAWANG.”**

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

Dalam pelaksanaan praktek darat, penulis ingin menyerap teori – teori yang diperoleh dalam perkuliahan maupun studi kepustakaan dan studi dokumen dengan kenyataan yang didapat dalam pelaksanaan praktek darat, sehingga penulisan ini mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan bongkar muat petikemas di PT.Pelindo *regional* 1 TPK Perawang.
2. Untuk mengetahui Kendala - Kendala yang terjadi saat pelaksanaan bongkar muat petikemas di PT.Pelindo *regional* 1 TPK Perawang.

1.2.2 Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan Karya Tulis ini mempunyai beberapa kegunaan yang sangat berarti bagi penulis. Adapun kegunaan penulisan ini adalah :

1. Khususnya bagi penulis sendiri untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Diploma Tiga Jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan di Politeknik Negeri Bengkalis.
2. Menambah khasanah perpustakaan di Politeknik Negeri Bengkalis.
3. Memperluas wawasan gambaran kerja bagi para pembaca dan bagi taruna/i di Politeknik Negeri Bengkalis khususnya yang berkaitan dengan Jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan.

1.3 Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, agar tidak menyimpang dari tema dan judul serta tetap terfokus pada materi permasalahan, maka penulis akan memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan bongkar muat petikemas di PT. Pelindo *regional 1* TPK Perawang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses bongkar muat petikemas di PT. Pelindo *regional 1* TPK Perawang?

1.4 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan menjadi luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Fokus penelitian hanya pada proses bongkar muat kontainer di PT. Pelindo *regional 1* TPK Perawang, dan tidak membahas proses pengiriman barang dari pelabuhan ke tempat tujuan.

2. Penelitian ini hanya akan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kinerja bongkar muat kontainer, seperti aspek teknis, sumber daya manusia, manajemen, dan sistem keamanan.
3. Penelitian ini hanya akan mengambil sampel dari pengguna jasa pelabuhan yang menggunakan jasa pembongkaran kontainer di PT. Pelindo *regional* 1 TPK Perawang.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana Proposal Tugas Akhir (TA). Adapun penyusunan adalah sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN (Indonesia)

***FINAL PROJECT SHEET* (Inggris)**

ABSTRAK (Indonesia)

***ABSTRACT* (Inggris)**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.2 Latar belakang

1.2 Tujuan dan kegunaan penelitian

1.3 Perumusan masalah

1.4 Pembatasan masalah

1.5 Sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI/ TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan teoritis

2.2 Studi penelitian terdahulu

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan tempat penelitian

3.2 Teknik pengumpulan data

3.3 Teknik analisis data

3.4 Jadwal penelitian

DAFTAR PUSTAKA